

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Tentunya pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu dan relevan dengan tuntutan kebutuhan manusia itu sendiri. Karena itu sangat diperlukan adanya upaya pembenahan yang sungguh-sungguh dalam berbagai hal penyelenggaraan pendidikan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu satuan lembaga pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar. Sampai saat ini penyelenggaraan pendidikan pada SD lamanya 6 tahun, dengan komposisi murid di mulai dari Kelas I sampai dengan Kelas VI. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0487/U/1992 Bab II. Pasal 2 ayat 1 (1993: 16), bahwa tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui SD yaitu :

"Memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke SLTP".

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan berbagai kegiatan melalui proses pembelajaran yang memadai. Di dalam proses tersebut perlu didukung dengan berbagai masukan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada akhirnya diharapkan adanya keluaran (out put) pendidikan yang bermutu dan relevan. Hal yang perlu dibenahi didalam proses pendidikan mulai dari pengembangan manajemen, menciptakan lingkungan fisik dan nonfisik yang harmonis, serta menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tepat. namun proses tersebut tidak mungkin tercipta, bila tidak didukung dengan berbagai sumber (resources) sebagai masukan (input) yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Masukan yang dominan yang diperlukan didalam mekanisme proses pendidikan diantaranya berupa sarana dan prasarana. Winardi (1983:3) mengemukakan bahwa "guna mencapai suatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa tersedianya sumber-sumber dasar, diantaranya peralatan (materials)". Terlebih-lebih sarana prasarana pendidikan yang mutlak diperlukan bagi lembaga pendidikan pada SD jumlahnya

sangat banyak dengan jenis dan corak yang beraneka ragam. Secara umum barang-barang yang mutlak diperlukan pada SD Negeri meliputi tanah, gedung, alat kantor, mobuler, laboratorium, alat peraga, buku, alat olah raga, dan alat kesenian.

SD yang berstatus Negeri yang dikelola di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang terpecar di 26 Kecamatan jumlahnya 836 SD. Didalam pengelolaan khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana yang selama ini telah dilakukan dengan berbagai macam upaya. Usaha yang telah dilakukan oleh instansi kedinasan bersumber dari APBN, APBD, swadaya BP.3, Gerakan Cinta Almamater Sekolah Dasar (Gentra Masekdas), hibah, wakaf, dan donatur lainnya. Berbagai usaha tersebut masih terus menerus diupayakan dan diperjuangkan. Namun kebutuhan prasarana dan sarana khususnya pada SD Negeri sampai saat ini belum terpenuhi. Karena itu Sarwoto (1994 : 49) mengemukakan bahwa "tersedianya unsur-unsur dasar tidak berlimpah-limpah hingga untuk mempergunakannya perlu didasarkan atas prinsip-prinsip efisiensi". Prinsip ini sangatlah penting mengingat tidak setiap barang yang diperlukan dapat selalu tersedia. Keterbatasan itu pada umumnya disebabkan oleh kemampuan anggaran yang tersedia. Disamping itu setiap barang baik karena faktor mekanik atau secara alami lambat

atau cepat pasti akan mengalami kerusakan. Selain itu setiap barang dihadapkan kepada suatu resiko kehilangan. Resiko tersebut dapat terjadi karena faktor kehilafan, kecerobohan kelalaian, atau faktor alam.

Berhubung setiap pengadaan sarana dan prasarana dihadapkan pada faktor keterbatasan atau kelangkaan, maka dalam penggunaannya disamping harus optimal tapi juga harus efesien, efektif, dan produktif. Oleh sebab itu terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada pada SD perlu dilakukan pengaturan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan. Dalam Buku Dirjen PUOD (IV C:5), ditegaskan bahwa "setiap unit/satuan kerja dalam pengaturan barang inventaris yang ada harus melakukan pengisian pormulir". Pengaturan ini dimaksudkan paling tidak untuk mengetahui dengan tepat mengenai kondisi dan keberadaan barang. Setiap barang mutlak harus diketahui dari segi lokasi dimana barang itu berada, berapa banyak jumlahnya, bagaimana status kepemilikannya, dari mana asal usul barang itu diperoleh dan berapa nilai harganya.

Untuk dapat mengatur barang inventaris yang telah ada pada SD diperlukan kemampuan pegawai yang terampil. Walaupun mungkin Instansi/Dinas yang berkompeten mengelola SD sudah banyak melakukan berbagai upaya

pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang, seperti melalui penataran, diklat, pengarahan teknis, rapat, dan cara-cara lainnya. Namun upaya pembenahan yang telah dilakukan itu belum bisa dijadikan jaminan bahwa inventarisasi barang telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan. Dalam menangani barang yang berstatus inventaris, disamping dituntut memiliki kemampuan manajerial dan teknis, tapi juga harus dibarengi dengan kemampuan mentalitas. Dalam mengatur dan mengurus barang sangat perlu didukung dengan kejujuran, ketekunan, kesabaran, dan bahkan perlu kerja keras. Seandainya SDM aparat yang berupa kemampuan manajerial dan teknis itu tersedia, tapi bila segi mentalitas kurang memadai, maka pengaturan barang inventaris tidak mungkin dapat dijamin sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa mengurus dan mengatur barang inventaris sungguh tidak bisa dianggap ringan dan terlebih lagi tidak bisa disepelekan. Hal ini disebabkan setiap barang mempunyai nilai guna dan nilai harga, karena itu akan dihadapkan dengan resiko kehilangan. Dengan mengandung resiko itulah maka inventarisasi sarana prasarana pendidikan yang telah ada pada SD merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Rasanya sering terjadi kasus yang berkaitan dengan barang inventaris yang terdapat pada SD Negeri di Kota Bandung. Kasus demi kasus itu misalnya berupa pengakuan kepemilikan tanah, kehilangan alat kantor, mobuler, buku-buku yang selama ini banyak yang tidak berada di perpustakaan, dan banyak lagi kasus lainnya. Dalam setiap terjadi kasus mungkin Kepala SD yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya. Namun demikian belum tentu dilakukan penyesuaian data inventaris. Buktinya bila diadakan pendaftaran barang, maka secara mendadak petugas membawa catatan lama untuk disesuaikan dengan barang yang terdapat pada suatu ruangan. Bukti lainnya, bila diminta laporan mengenai keadaan barang, sering terlambat bahkan terkadang diabaikan. Akibatnya data barang inventaris tidak akurat dan tidak *up to date*. Keadaan ini menunjukkan ketidakteraturan dalam mengatur barang inventaris. Berarti juga merupakan indikator yang menunjukkan bahwa pengaturan dan pengurusan barang inventaris masih belum sesuai dengan ketentuan. Apabila kondisi pengaturan barang inventaris tersebut dibiarkan berlanjut, maka akan mempunyai dampak negatif yang lebih besar dan berat. Diantaranya dengan tidak ada keakuratan data akan menyulitkan ketepatan dalam

menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang. Pada akhirnya dapat menimbulkan pemborosan yang luar biasa dalam pembiayaan pendidikan. Lebih jauh lagi dapat menimbulkan rendahnya kinerja bagi pengelola pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar.

Agar barang inventaris yang terdapat pada SD Negeri dapat diatur sesuai dengan ketentuan, disamping perlu keahlian dan mentalitas pengelola barang, maka perlu juga adanya pengawasan dari berbagai unsur instansi yang berkompeten. Sondang P. Siagian (1989 : 138) mengemukakan bahwa "pengawasan tidak untuk dimaksudkan menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul". Ini berarti juga pengawasan bermaksud agar setiap pegawai dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat sesuai dengan kebijakan, rencana, petunjuk, arahan, ketentuan, dan peraturan - peraturan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Karena itulah pengawasan harus dilakukan melalui berbagai sistim. Pengawasan terhadap pengaturan barang inventaris yang terdapat pada SD Negeri perlu dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan dan Kota. Dalam hal ini pengawasan juga perlu dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang khusus membidangi kekayaan daerah.





Dengan keterlibatan berbagai instansi dalam melakukan pengawasan, maka sistem pengawasan yang ada dapat dinilai memadai untuk menertibkan pengaturan barang inventaris.

Hal-hal itulah yang mendorong untuk melakukan penelitian secara ilmiah mengenai sistem pengawasan dalam kaitannya dengan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan yang terdapat pada SD Negeri di Kota Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti telah dikemukakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam setiap organisasi. Pengawasan dimaksudkan bukan untuk mencari siapa yang berbuat salah, tetapi untuk mencari pekerjaan apa yang belum benar. Pengawasan akan lebih penting apabila disadari bahwa setiap manusia disamping memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Telah dikemukakan juga bahwa prasarana dan sarana juga sebagai salah satu sumber yang mutlak diperlukan dalam proses pendidikan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana



pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung baik secara kualitatif maupun kuantitatif, namun tetap belum pernah terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena setiap penyediaan sarana prasarana sudah tentu akan selalu dihadapkan pada faktor keterbatasan, terutama kemampuan dalam segi pembiayaan. Karena itu terhadap sarana prasarana pendidikan yang telah ada pada SD Negeri di Kota Bandung perlu ditangani secara benar dan teratur sesuai dengan ketentuan.

Bertitik tolak dari rumusan tersebut dihubungkan dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu "sistem pengawasan" dan "inventarisasi prasana dan sarana pendidikan". Kedua fokus masalah tersebut dirumuskan ke dalam suatu judul menjadi "Sistem pengawasan terhadap inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung". Sistem pengawasan terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain saling menunjang dan tidak bisa dipisah-pisahkan yang membentuk satu kesatuan. Sub sistem itu dapat berupa yang disebut pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan atasan langsung/pengawasan melekat, dan pengawasan umum/fungsional. Masing-masing sub sistem tersebut



dapat berkedudukan sebagai pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Selain itu setiap jenis pengawasan dengan sendirinya diperlukan langkah-langkah pengawasan. Secara sistematis, langkah-langkah pengawasan dalam setiap metoda pengawasan dilakukan berupa kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan untuk dibandingkan dengan standar atau pedoman yang ada, menentukan hal-hal yang dianggap menyimpang, dan melakukan tindak lanjut sebagai langkah perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan inventarisasi barang termasuk prasarana dan sarana pendidikan, yaitu kegiatan mengatur barang-barang inventaris yang ada atau yang telah dimiliki. Adapun jenis kegiatan inventarisasi dapat meliputi pengisian Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan pelaporan Barang. Kegiatan dalam setiap jenis tersebut perlu menunjukkan kelengkapan data, keakuratan data, dan data yang *up to date*.

Kedua fokus permasalahan tersebut di atas terasa teramat penting untuk diteliti, mengingat dengan diterapkannya suatu sistem pengawasan paling tidak dapat mengurangi ketidakteraturan dalam inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Pengawasan dari berbagai instansi yang berkompeten di tingkat Kecamatan

dan Kota, maka paling tidak data prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri akan menjadi lebih akurat, lengkap, dan *up to date*.

Kedua fokus masalah dalam penelitian ini diajukan dalam bentuk dua rumusan pertanyaan pokok, yaitu:

1. Sudah sejauhmana sistem pengawasan yang berjalan selama ini.
2. Dengan sistem pengawasan yang ada, sudah sejauhmana kondisi pelaksanaan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung.

Apabila kedua pertanyaan pokok tersebut dirinci lebih lanjut, maka dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan.
  - a. Apakah instansi/pejabat yang berkompeten telah melakukan pengawasan?
  - b. Sistem pengawasan apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan?
  - c. Aspek-aspek apa saja yang diperiksa terhadap inventarisasi prasarana dan sarana?
  - d. Bagaimana langkah-langkah pengawasan yang dilakukan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan?

## 2. Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan.

- a. Apakah pada SD Negeri dalam menginventarisasi prasarana dan sarana pendidikan sudah membuat KIR, KIB, BHB, dan BI?
- b. Apakah di dalam BI, BHB, KIB, dan KIR sudah terdapat kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data prasarana dan sarana pendidikan?
- c. Apakah pada setiap prasarana dan sarana pendidikan yang ada pada SD Negeri sudah telah dibubuhi penomoran barang?
- d. Apakah tanah yang ditempati SD Negeri sudah memiliki sertifikat?
- e. Apakah setiap SD Negeri pada setiap semester telah melakukan pelaporan barang?

Dengan sistem pengawasan yang berupa pengawasan langsung, tidak langsung, atasan langsung, atau melekat, dan bersifat umum yang dilakukan oleh unit kerja, satuan kerja, atau badan pengawasan fungsional, maka sistem pengawasan yang satu dengan sistem pengawasan yang lainnya dapat saling melengkapi dan saling memperkuat. Sujanto (1986 :50) mengemukakan bahwa "Dengan sistem pengawasan dapat berefek mengendalikan pekerjaan. Ini berarti dengan sistem pengawasan juga dapat mengetahui inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan yang sesungguhnya

berjalan selama ini. Di lain pihak sistem pengawasan dapat mengarahkan kegiatan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri agar terlaksana sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang diharapkan yang dapat memperoleh nilai tambah. Harapan dimaksud yaitu adanya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam Ilmu Administrasi Pendidikan. Disamping itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu :

1. Ingin mengetahui sejauh mana sistem pengawasan yang ada yang dilakukan oleh instansi yang berkompeten

terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.

2. Ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.

Di dalam kedua tujuan utama tersebut mengandung beberapa tujuan yang bersifat khusus yang ingin dicapai, yaitu dalam aspek :

1. Sistem Pengawasan.

- a. Ingin mengetahui sistem pengawasan apa saja yang dilakukan selama ini oleh instansi-instansi yang berkompeten terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.
- b. Ingin mengetahui aspek-aspek apa saja yang diperiksa dalam inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.
- c. Ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah pengawasan yang dilakukan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.

2. Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan

- a. Ingin mengetahui apakah pada SD Negeri telah terdapat KIR, KIB, dan BI.
- b. Ingin mengetahui apakah pada KIR, KIB, dan BI yang terdapat pada SD Negeri telah lengkap diisi dengan data?

- c. Ingin mengetahui apakah dalam setiap prasarana dan sarana pendidikan yang ada telah tercantum penulisan penomoran barang?
- d. Ingin mengetahui apakah tanah yang ditempati SD Negeri telah dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan tanah?
- e. Ingin mengetahui apakah pada setiap semester telah dibuatkan laporan keadaan prasarana dan sarana pendidikan?

Untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus tersebut, penelitian ini didukung dengan data empirik yang diperoleh melalui pengamatan, angket, dan wawancara.

## **2. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan dicapainya tujuan sebagaimana di uraikan di atas, hasil penelitian ini dapat berguna untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu bagi :

1. Instansi yang berkompeten didalam melakukan pengawasan. Instansi itu meliputi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Bawasda Pemerintah Kota Bandung. Instansi tersebut masing-masing bisa memperoleh masukan mengenai kondisi inventarisasi prasarana dan sarana



pendidikan yang berjalan selama ini. Disamping itu hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat juga untuk mengambil langkah berbagai perbaikan dan pembaharuan dalam melakukan pengawasan berikutnya. Dengan demikian sistem pengawasan setahap demi setahap dilakukan dengan cara yang lebih baik. Pada akhirnya berpengaruh terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksana inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Karena jabatannya, maka Kepala Sekolah adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri yang dipimpinnya. Kepala Sekolah dapat memperoleh berbagai masukan dalam menangani inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan, sehingga dapat memperteguh keyakinan bahwa inventarisasi itu amatlah penting. Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan yang dilakukan dengan cara yang asal-asalan akan memperoleh resiko yang besarbaik bagi negara, pemerintah, masyarakat, dan terutama bagi dirinya sendiri sebagai manajer sekolah. Karena itu inventarisasi barang harus

dilakukan secara sungguh-sungguh. Terlebih-lebih setelah mendapat pengawasan yang lebih serius, maka Kepala Sekolah dapat lebih serius juga dalam menangani inventarisasi barang yang ada pada lingkungan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Pemerintah Kota Bandung. Dengan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berkompeten, maka inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan akan semakin baik sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini berarti data mengenai barang inventaris semakin akurat, lengkap, dan *up to date*. Dengan demikian maka kekayaan Pemerintah Kota Bandung, baik jenis, jumlah maupun nilai harga seluruh barang yang berstatus inventaris yang tersebar pada SD Negeri dapat dihitung secara lebih akurat.

4. Pengembangan ilmu pengetahuan. Secara keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi pendidikan senantiasa selalu dinamis seiring dengan perubahan dan tuntutan jaman. Dengan penelitianlah suatu ilmu dapat berkembang terus. Karena itu penelitian ini merupakan salah

satu wujud dari sekian banyak penelitian guna pengembangan ilmu administrasi pendidikan.

Perlu disadari juga bahwa kegunaan dari hasil penelitian ini tentunya tidak langsung terasa secara nyata membawa perubahan dalam waktu singkat. Setiap perubahan diperlukan melalui suatu proses dan waktu. Hal ini tergantung juga sejauh mana bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan inventarisasi mampu menyimak informasi dari hasil penelitian ini. Kemudian seberapa besar memberi motivasi bagi dirinya untuk berbuat yang lebih baik, baik bagi pelaku pengawasan maupun pelaksana inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan untuk berbuat yang lebih baik.

#### **D. Penjelasan Konsep**

Agar terdapat kesamaan persepsi dan pola pikir bagi pembaca, kiranya perlu adanya penjelasan terhadap beberapa konsep yang terdapat pada judul penelitian ini. Konsep-konsep itu meliputi sistim pengawasan, inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan, dan SD Negeri.

1. Sistem pengawasan dapat terdiri dari beberapa sub sistem pengawasan. Sub sistem pengawasan dapat

terdiri semua jenis pengawasan dan langkah-langkah pengawasan. Setiap jenis dan langkah dalam pengawasan satu sama lain saling mempengaruhi, memperkuat, tidak dapat dipisahkan, dan membentuk satu kesatuan.

2. Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Dalam ilmu administrasi dikenal terdapat beberapa sumber (resources) yang diperlukan dalam proses manajemen. Sumber-sumber itu diantaranya berupa material yang sering juga disebut peralatan atau perlengkapan. Dalam dunia pendidikan lazimnya lebih sering disebut sarana dan prasarana pendidikan. Semua istilah itu masing-masing dapat digunakan hanya tergantung pada konteksnya. Secara visual setiap material/peralatan/perlengkapan/fasilitas/barang/sarana dan prasarana yang sesungguhnya berwujud berupa barang. Setiap barang yang telah ada dan dikuasai penggunaannya oleh suatu unit kerja misalnya SD Negeri, maka semua barang itu statusnya sebagai barang inventaris. Kegiatan untuk mengatur, mengurus, mencatat, dan melaporkan seluruh barang yang berstatus inventaris yang terdapat pada SD Negeri itulah disebut inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan.

3. Selain SD Negeri, di Kota Bandung terdapat banyak SD yang berstatus swasta. SD yang berstatus negeri dominannya paling tidak bercirikan semua pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ciri lainnya semua pembiayaan termasuk pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan merupakan beban anggaran pemerintah. Di Kota Bandung, SD yang berstatus negeri berjumlah 836 SD. Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah (otda), maka pengelolaan pendidikan termasuk SD negeri sepenuhnya berada pada tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Secara teknis instansi yang menangani pendidikan di Kota Bandung adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Penjelasan ketiga konsep tersebut merupakan hal yang penting. ini dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran interpretasi makna penelitian.

#### **E. Kerangka Acuan Penelitian**

Dalam penelitian, kerangka acuan merupakan dasar alur pemikiran yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam meninjau sistem pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri didasarkan pada beberapa sudut pandang, yaitu:



1. Dalam diagram 1.1 halaman 24, pengawasan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Semua bentuk pengawasan yaitu berupa pengawasan atasan langsung maupun pengawasan fungsional baik bersifat internal dan eksternal serta langkah-langkah pengawasan merupakan sub-sub sistem dalam sistem pengawasan. Sub-sub tersebut satu sama lain saling terkait, saling menunjang, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan yang membentuk satu kesatuan dalam sistem pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.
2. Dilihat dari segi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka yang berkedudukan sebagai pengawasan atasan langsung meliputi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan yang berkedudukan sebagai pengawasan fungsional meliputi Bawasda Pemerintah Kota Bandung, Sub Bagian Perlengkapan, Seksi Prasarana dan Sarana SD, dan Sub Seksi Prasarana dan Sarana. Semua pejabat, unit kerja, dan satuan kerja tersebut satu sama lain saling melengkapi dan saling menunjang yang membentuk satu kesatuan dalam melakukan pengawasan sebagai suatu sistem. Demikian juga

langkah-langkah pengawasan yang dimulai dengan penggunaan standar, penilaian, perbandingan, pencacatan, dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis. Langkah yang satu tidak bisa dilakukan tanpa didahului oleh langkah-langkah sebelumnya, sehingga langkah yang satu dengan langkah-langkah lainnya saling terkait dan saling berkesinambungan yang membentuk satu kesatuan langkah dalam sistem pengawasan.

3. Salah satu fungsi yang mutlak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan adalah melakukan pengawasan, termasuk pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri. Sedangkan bagi Bawasda, Sub Bagian Perlengkapan, Seksi Prasarana & Sarana, dan Sub Seksi Prasarana dan Sarana secara fungsional merupakan salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, termasuk pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.
4. Konsentrasi penelitian kepada sejauh mana sub-sub sistem sebagai suatu sistem dalam pengawasan tersebut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung. Bersamaan dengan hal itu juga sejauh mana tahap pelaksanaan



inventarisasi tersebut. Konsekuensi dari suatu jabatan, maka yang bertanggung jawab dalam inventarisasi adalah Kepala Sekolah pada SD Negeri yang bersangkutan.

5. Kondisi baik, sedang, atau kurang dalam sistem pengawasan yang selama ini berjalan tentu membawa pada kondisi pelaksanaan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri. Pada kondisi tahap baik, sedang atau kurang dalam inventarisasi tersebut akan berperan dalam menunjang proses pembelajaran, menghasilkan keakuratan data, dapat menghitung jumlah kekayaan negara/daerah, dan merupakan akuntabilitas penggunaan prasarana dan sarana pendidikan. Pada akhirnya kondisi kemampuan tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja aparat yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara skematis mengenai acuan penelitian ini dapat dilihat pada diagram 1.1 pada halaman berikut. Pada diagram tersebut mengandung makna bahwa dengan akuratnya data barang yang berstatus inventaris, maka besarnya kekayaan daerah Kota Bandung yang terinvestasi dalam dunia pendidikan khususnya pada SD Negeri dapat diketahui secara akurat. Pada akhirnya akan membawa pengaruh positif terhadap kredibilitas kinerja aparat pendidikan pada tingkat SD Negeri, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, dan Dinas Pendidikan Kota.

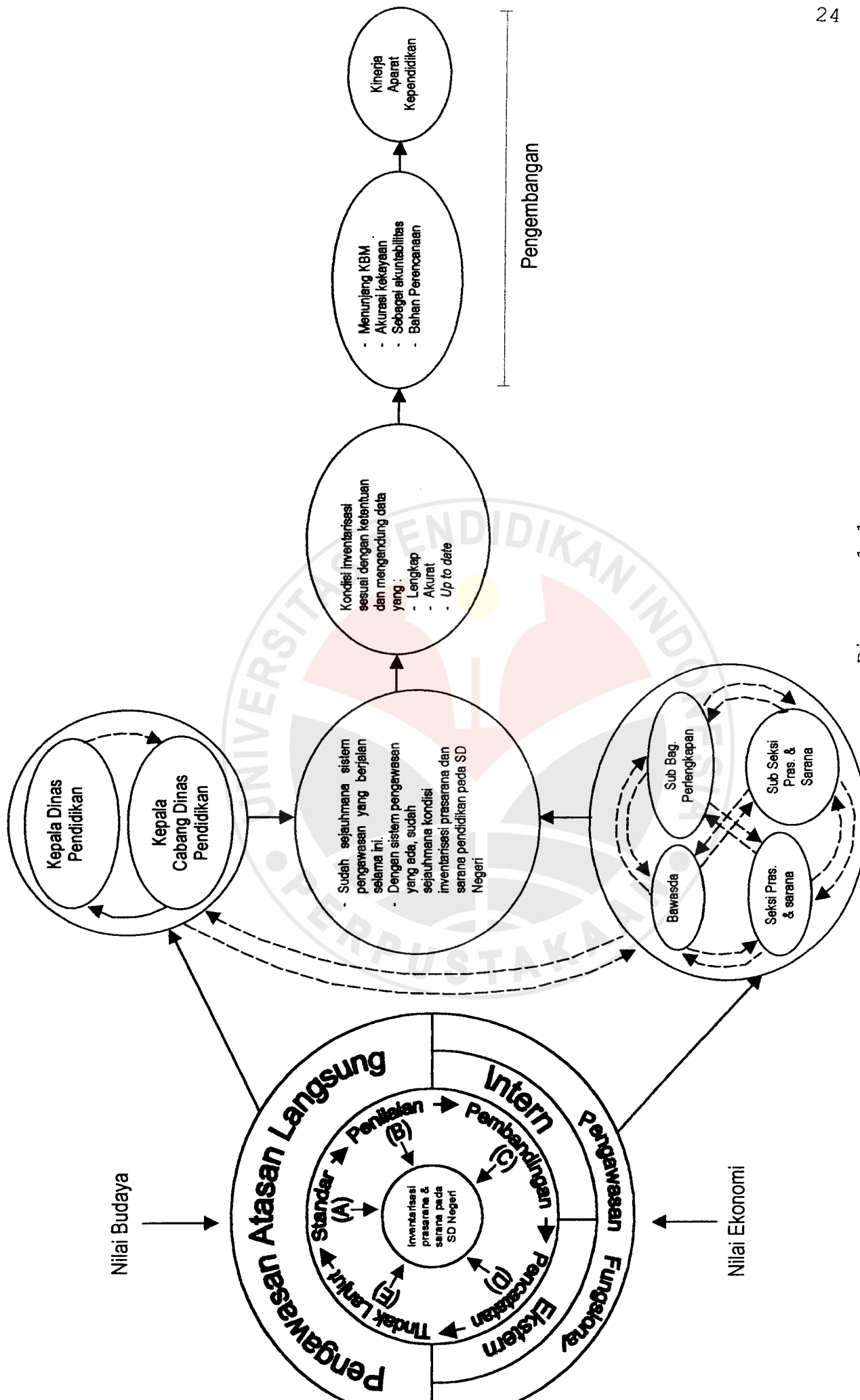


Diagram 1.1  
Kerangka Berfikir

Satu hal yang perlu diperhatikan dan jangan sampai diabaikan yaitu faktor nilai. Pengawasan sebagai suatu sistem akan dipengaruhi oleh faktor nilai-nilai yang ada, berkembang, dan dianut oleh aparat yang ada pada suatu instansi, unit kerja, atau satuan kerja. Dalam menerapkan suatu sistem pengawasan paling tidak terdapat dua faktor nilai yang dominan yaitu nilai budaya dan nilai ekonomi. Kedua nilai tersebut perlu dicermati dengan tepat, agar sistem pengawasan menjadi efektif terhadap pelaksanaan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Seandainya tidak dicermati dengan tepat, maka kedua faktor nilai tersebut dapat menjadi kendala atau penghambat bagi efektivitas sistem pengawasan itu sendiri. Dengan demikian sebaik-baiknya menerapkan suatu sistem pengawasan berarti didalamnya terkandung setepat-tepatnya mencermati nilai budaya dan nilai ekonomi.

Hal-hal inilah yang dibahas dalam sajian teoritis dan analisis pada uraian-uraian selanjutnya.

